

DIJODOHKAN DI PILGUB DKI

## Sahroni-Airin, Masih Perkenalan dan Perlu Pendekatan

JAKARTA (IM) - Bendahara DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan wacana dirinya dipasang dengan politisi Partai Golkar, Airin Rachmi Diany di Pilkada DKI Jakarta 2024 baru sebatas perkenalan. Sehingga, dia melihat masih perlu pendekatan lebih intens dengan mantan Wali Kota Tangsel itu.

"Ini masih perkenalan dan perlu pendekatan. Ibaratnya kalau sudah saling kenal, baru pacaran," katanya di Jakarta, Jumat (11/3).

Dia mengungkapkan, saat ini Partai NasDem diminta fokus untuk menjalin komunikasi serta perkenalan intens dengan Airin dan Partai Golkar untuk menatap tahap selanjutnya.

Hal itu karena saat ini jumlah kursi Partai NasDem dan Partai Golkar hanya 13 kursi di DPRD DKI Jakarta sehingga koalisi dengan partai lain karena membutuhkan 22 kursi lagi.

"Sementara kami 'pacaran' dulu untuk jenjang lebih dalam. Setelah itu baru berunding untuk pendekatan kepada saudara-saudara yang lain," tutup Sahroni.

Sebelumnya, Partai NasDem tertarik memasang kadernya Ahmad Sahroni dengan mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode Airin Rachmi Diany untuk Pilkada DKI Jakarta.

Ketua Teritorial Pemecatan Pemilu Partai NasDem Wilayah Jawa I, Effendy Choirie menuturkan, NasDem mempertimbangkan Sahroni sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada serentak 2024. Untuk mengusung Sahroni, NasDem yang memiliki 7 kursi DPRD DKI Jakarta, membutuhkan koalisi. Figur yang dilirik adalah Airin dari Partai Golkar.

"Salah satu yang menarik, pasangan untuk kakak Sahroni adalah Mbak Airin.

Saya kira apabila itu terjadi maka akan menjadi pasangan yang keren dan seksi," ujar Effendy.

Effendy menilai pasangan Sahroni-Airin kompetitif menghadapi tokoh-tokoh lain seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dan Ahmed Zaki Iskandar dari partai Golkar.

Untuk mengusung pasangan Sahroni-Airin ini, NasDem membuka koalisi dengan partai Golkar. Serta partai-partai seperti PKS, PKB, PPP untuk membentuk koalisi.

Sementara itu, Airlangga mengungkapkan, pertemuannya dengan Ketua NasDem Surya Paloh tak hanya membicarakan Pilpres ataupun Pemilu 2024 mendatang.

"Ditambah lagi kita tadi melihat hadir juga di sini Ibu Airin dan Pak Sahroni. Sehingga pembahasannya kita ketahui tidak hanya berbicara makro, tetapi juga bicara mikro yang detail," ujarnya.

Namun, Airlangga masih menutup rapat apakah yang ia maksud memasang Airin dengan Sahroni di Pilgub DKI Jakarta. Ia bilang akan ada waktunya Airin dan Sahroni berbicara langsung.

Dalam kesempatan terpisah, Sahroni menolak memberikan pernyataan terkait 'perjodohannya'.

"Jadi kalau pak Sahroni dan bu Airin kami persilahkan pak Sahroni dan bu Airin yang berbicara dulu nanti pada waktunya bukan pada siang hari ini," katanya.

Airlangga mengatakan kebetulan siang ini Airin dan Sahroni saling dipertemukan. Ia bilang ada hal tertutup yang belum bisa disampaikan ke publik.

"Karena ini kan kebetulan dua dua masuk tim yang bersilahturahmi hari ini sehingga tentu banyak hal pertemuan tertutup maka ada yang disampaikan ada yang tidak," tutupnya. ● yan

## Hadiri Rakor KPK, Plt. Bupati Bekasi Tekankan Komitmen Antisipasi Tindak Korupsi



Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (atas, sedang tanda tangan) saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jawa Barat di Aula Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Kamis (10/3).

BANDUNG (IM) - Plt. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Akhmad Marjuki, didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA. Supratman, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jawa Barat. Acara berlangsung di Aula Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, pada Kamis (10/3).

Dalam wawancara terpisah, Plt. Bupati Bekasi menyampaikan bahwa, rapat kali itu menekankan pada komitmen para kepala daerah untuk mengantisipasi tindakan korupsi di masing-masing wilayah.

"Hari ini kita baru saja selesai mengikuti rapat pemberantasan korupsi, kali ini yang ditekankan yaitu sejauh mana kepala daerah dapat mengantisipasi tindakan korupsi di wilayah masing-masing," ucapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Kamis (10/3) malam.

Lebih lanjut, dalam mengoptimalkan pendapatan daerah di era masa transisi pandemi, dirinya akan melakukan berbagai upaya dengan mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Bekasi.

"Tentu saja, hal-hal yang sekiranya bisa kami akan lakukan. Kita gali potensi-potensi ekonomi, seiring dengan menurunnya Covid-19," katanya.

Kemudian, agenda dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah yang diberikan atas aset pemerintah daerah dan penandatanganan pakta integritas. Dalam hal ini, Plt. Bupati Bekasi menerima langsung penyerahan sertifikat RSUD Cabangbungin yang diberikan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat.

"Tadi juga sudah diserahkan dan diterima aset Penda berupa sertifikat terkait RSUD Cabangbungin, ke depan semoga semua aset penda akan disertifikasikan," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap Kepala Daerah dapat mengevaluasi mengenai indeks kesehatan, indeks pangan termasuk indeks pemberantasan korupsi di wilayah daerah tersebut, untuk kedepannya pemerintah daerah lebih baik lagi serta dapat menyiapkan perbaikan-perbaikan terkait tindak pemberantasan korupsi karena itulah yang akan dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kepala daerah semoga dapat mengevaluasi terkait indeks-indeks berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Serta perlu dipersiapkan perbaikan-perbaikan untuk menindak hal tersebut, karena itulah yang akan dinilai oleh KPK," tuturnya. ● mdl

# 4 Metropolis

IDN/ANTARA



## Pengamat: Para Buzzer tak Pernah Mau Mengakui Prestasi Anies

Anies kerap digambarkan gubernur yang tidak tahu kerja. Para buzzer tidak pernah mau mengakui prestasi Anies baik nasional dan internasional. Pola yang digunakan buzzer bertujuan untuk memberi image buruk terhadap Anies, yang bertujuan untuk menggagalkan Anies sebagai capres. Anies di-framing sebagai sosok yang tak pantas menjadi capres.

JAKARTA (IM) - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menga-

takan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan merupakan satu-satunya calon presiden (capres) potensial di

luar lingkaran kekuasaan Istana Kepresidenan. Hal itu dapat dilihat dari hasil berbagai survei lembaga kredibel yang menempatkannya selalu di urutan tiga besar.

"Anies bersama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo selalu bergantian menempati elektabilitas urutan pertama. Dari tiga nama tersebut memang Anies yang berada di luar lingkaran kekuasaan Istana. Sementara Prabowo dan Ganjar merupakan bagian dari lingkaran kekuasaan Istana," kata Jamiluddin, Jumat (11/3).

Dia menyebut, Anies juga capres potensial dari kelompok

yang selama ini berseberangan dengan kebijakan Istana. Bahkan, sambung dia, tidak berlebihan Anies dianggap capres dari para oposan. Menurut Jamiluddin, wajar apabila Anies kerap mendapat serangan dari buzzer. Para buzzer pun secara konsisten berupaya menafikan kinerja Anies dan menjatuhkan kredibilitas eks rektor Universitas Paramadina tersebut.

"Anies kerap digambarkan gubernur yang tidak tahu kerja. Para buzzer tidak pernah mau mengakui prestasi Anies baik nasional dan internasional,"

kata Jamiluddin.

Dia menyebut, pola yang digunakan buzzer itu bertujuan untuk memberi image buruk terhadap Anies. Jamiluddin menganalisis, kerja buzzer membuat Anies terlihat gagal dan menyampaikan informasi negatif secara terus-menerus kepada masyarakat agar lapisan bawah percaya.

"Semua itu bertujuan untuk menggagalkan Anies sebagai capres. Anies di-framing sebagai sosok yang tak pantas menjadi capres," kata Jamiluddin. ● yan

## Kepulauan Seribu Siapkan Akses Layanan Ramah Anak

JAKARTA (IM) - Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Kabupaten Kepulauan Seribu, Hary Sutanto mengatakan, seluruh unit kerja perangkat daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu siap mewujudkan akses layanan ramah anak.

Berdasarkan data 2020, sekitar 30 persen (lebih kurang 8.769 jiwa) dari total penduduk Kepulauan Seribu yang mencapai 29.230 jiwa merupakan anak usia 0-18 tahun.

"Anak-anak ini akan menjadi generasi penerus di Kepulauan Seribu, kami (UKPD) di lingkungan Kepulauan Seribu harus jaga bersama dan lindungi agar tidak ada anak-anak Kepulauan Seribu yang mengalami tindak kekerasan, sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik," ujar Hary dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/3).

Langkah awal sudah dimulai dengan adanya kegiatan bertajuk 'Sejuta Boneka dan Masker Mini Sapa Kak Seto' yang menghadirkan pemerintah anak Seto Mulyadi, guna menghibur dan memotivasi

anak Kepulauan Seribu dengan berdongeng dan bermain bersama di Plaza Kabupaten, Pulau Pramuka, dan Pulau Tidung pada Kamis (10/3).

Dalam kegiatan tersebut, Kak Seto juga mengajak segenap pemangku kepentingan dan masyarakat Kepulauan Seribu berikar untuk menyatukan tekad terhadap anak guna mewujudkan Kepulauan Seribu ramah anak. "Dengan ikrar bersama, serta pembagian sejuta boneka dan masker mini untuk anak-anak di Kepulauan Seribu, harapan saya bisa memotivasi anak-anak Kepulauan Seribu untuk tumbuh kembang lebih baik lagi," kata Hary.

Setelah kegiatan itu, menurut Hary, seluruh lintas UKPD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung seluruh aspek layanan ramah anak yang berorientasi pada perlindungan anak agar Kepulauan Seribu bisa mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak. Karena, Kabupaten Kepulauan Seribu bisa memenuhi 24 indikator menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat Madya pada 2021 lalu berkat sinergi lintas UKPD. ● yan

## Pemkab Bekasi dan DPRD Sinkronisasi Usulan Kegiatan

CIKARANG (IM) - Pemerintah Bekasi, Jawa Barat memulai sinkronisasi hasil usulan kegiatan yang tertuang dalam pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat guna mempercepat realisasi pembangunan di daerah itu.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono menjelaskan hasil sinkronisasi pokok-pokok pikiran anggota dewan ini selanjutnya akan dirumuskan sebagai bahan dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2023.

"Jadi kami menyelaraskan usulan dewan agar sesuai dengan apa yang diajukan sehingga bisa dimasukkan ke dalam RKPD Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Jumat (11/3).

Dia menjelaskan jumlah usulan kegiatan pembangunan yang dimasukkan DPRD Kabupaten Bekasi sebanyak 9.425. Ribuan usulan pembangunan itu akan ditelaah bersama perangkat daerah terkait termasuk anggota dewan.

"Tentu saja telah dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah

yang telah disusun serta alokasi pendanaan dari anggaran daerah," ucapnya.

Agus berharap sinkronisasi ini mampu menyaring usulan-usulan bersifat prioritas yang memang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga ketika masuk dalam rencana kerja perangkat daerah menjadi tepat sasaran sekaligus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh mengatakan usulan masyarakat disampaikan melalui DPRD saat kegiatan reses yang kemudian dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Melalui sinkronisasi ini, kata dia, usulan yang melalui DPRD nantinya akan disampaikan dengan perencanaan pemerintah daerah, sesuai dengan yang sudah dimasukkan melalui SIPD tersebut.

"Saya berharap usulan masyarakat baik yang melalui DPRD maupun Musrenbang tingkat desa dan kecamatan dapat terealisasi, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat," kata dia. (KR-PRA). ● yan

## Pemkab Bekasi Gelar Latihan Gabungan Simulasi Tanggap Bencana

CIKARANG PUSAT (IM) - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dedy Supriyadi, membuka kegiatan Latihan Gabungan Simulasi Tanggap Darurat Bencana Tingkat Kabupaten Bekasi bersama dengan Polres Metro Bekasi, Kodim 0509, PDAM Tirta Bhagasasi, Basarnas, dan Penggiat Kebencanaan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan kantor PDAM Tirta Bhagasasi, Tegal Danas, Cikarang Pusat, pada Kamis (10/3), serta turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Camat Cikarang Pusat, serta Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi.

Sekda Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa, Pemkab Bekasi melaksanakan kegiatan itu bertujuan untuk mendeteksi serta mengantisipasi dini potensi bencana yang dapat terjadi.

Hadirnya berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bekasi merupakan tanggung jawab bersama.

"Hari ini kita saksikan simulasi tanggap bencana bekerja sama dengan instansi lainnya, karena kebencanaan

apapun merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya kegiatan ini kita harus mendeteksi dini mungkin dan mengantisipasi bencana tersebut," ucapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Kamis (10/3) malam.

Ia menjelaskan, beberapa wilayah rawan bencana di Kabupaten Bekasi telah dilibatkan dalam mitigasi kesiapsiagaan bencana. Hal tersebut dilakukan agar wilayah tersebut dapat merespon cepat apabila terjadi bencana, guna meminimalisir korban dan meminimalisir dampak yang dirasakan masyarakat.

"Sudah ditetapkan ada beberapa wilayah yang kita ikuti sebagai mitigasi bencana, seperti wilayah banjir, longsor, kebakaran di pusat kepadatan penduduk, dan lainnya dengan harapan dapat merespon cepat apabila terjadi bencana," jelasnya.

Selain diterapkannya beberapa upaya mitigasi, ia menambahkan bahwa Pemkab Bekasi telah memiliki perlengkapan, kesiapan sumber daya masyarakat, serta koordinasi antar perangkat daerah yang dinilai baik. Ia yakin Pemkab Bekasi tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi segala kemungkinan bencana.



Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi (tengah, atas) saat membuka kegiatan Latihan Gabungan Simulasi Tanggap Darurat Bencana Tingkat Kabupaten Bekasi bersama Polres Metro Bekasi, Kodim 0509, PDAM Tirta Bhagasasi, Basarnas dan Penggiat Kebencanaan di Tegal Danas, Cikarang Pusat, Kamis (10/3).